

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dakminto: *Strategi Sultan Agung dalam Ekspansi Serta Islamisasi pada Kerajaan Mataram Islam*. Tulisan dari Dalminto ini menggunakan pisau analisis sejarah yang berfokus pada ekspansi dan juga penyebaran agama Islam di pulau Jawa.

2.2 Kerangka Teori

Kekuasaan tidak lepas dari pembahasan di dalam ilmu politik. Kekuasaan juga dipelajari dalam ilmu sosial khususnya di dalam politik, kekuasaan di politik sendiri merupakan pembahasan yang memiliki makna kuat. Kekuasaan dalam politik adalah suatu usaha untuk menghimpun atau mempengaruhi orang lain. Kekuasaan dibagi menjadi dua sub yaitu kekuasaan otoritas dan wewenang.

Kekuasaan sendiri memiliki banyak tafsiran maupun definisi. Seperti yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo yaitu “Kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi tingkah laku seseorang baik individu maupun kelompok sehingga seseorang tersebut mengikuti keinginan dari orang yang mempengaruhi tersebut.”¹⁶

Menurut Harold D. Laswell dan Abraham dalam definisi kekuasaan perseptif sosiologi adalah “Kekuasaan adalah hubungan dimana satu orang atau

¹⁶ Miriam Budiardjo, “*Konsep Kekuasaan: Tinjauan Kepustakaan*”, dalam Miriam Budiardjo dkk, *Aneka Kuasa dan Wibawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hal 9.

sekelompok orang dapat menentukan tindakan orang lain atau kelompok lain dalam mencapai tujuan”.¹⁷ Sedangkan menurut Von Dorn hubungan kekuasaan dengan tindakan manusia adalah “Kekuasaan adalah kemampuan untuk membatasi tindakan alternatif seseorang atau kelompok sesuai dengan tujuan utama.”¹⁸

Ada berbagai macam kekuasaan yang termanifestasikan diberbagai bidang contohnya seperti. Pertama, kekuasaan yang berupa kedudukan seperti halnya pada komandan di dalam militer atau menteri dalam pemerintahan. Contoh tersebut diartikan bahwa kekuasaan kedudukan memiliki kontrol ke bawah dan memberikan sanksi jika adanya pelanggaran. Kedua, kekuasaan yang berupa kekayaan. Seperti halnya orang kaya yang dapat memberikan pekerjaan kepada seorang buruh dengan kekuasaan kekayaan yang ia miliki. Ketiga, kekuasaan yang berupa kepercayaan atau agama. Seperti halnya pada peran sentral tokoh agama yang memiliki kekuasaan atas umatnya maupun pengikutnya.¹⁹

Miriam membagi dua istilah kekuasaan, mengenai ruang lingkup kekusan dan jangkauan kekuasaan. Ruang lingkup kekuasaan berkaitan dengan sikap, perilaku, kegiatan, dan keputusan yang tunduk pada kekuasaan. Sedangkan kekuasaan yang dominan menjawab tentang siapa yang dikendalikan oleh kolektif kekuasaan.²⁰

¹⁷ Ibd, hal 17.

¹⁸ icip

¹⁹ Ibd, hal 13.

²⁰ Ibd, hal 14

Kekuasaan seringkali dihubungkan oleh pihak yang mendominasi dan pihak lain untuk diperintah (Penguasa dan dikuasai)²¹. Pada konteks ini, tidak ada kesamaan didalamnya karena satu pihak perlu memiliki peringkat yang lebih tinggi dibandingkan pihak lain. Menurut Roberto M. Maclver berpendapat bahwa kekuasaan di dalam masyarakat berbentuk piramida, definisi ini berkaitan dengan kekuasaan yang meliputi kekuasaan (*authorirty, authorirty*) dan legitimasi (*legitimacy, legitimacy*) dua konsep ini menjadi sangat penting di dalam memahami kekuasaan.²²

2.2.1 Legitimasi

Secara bahasa, legitimasi berasal dari kata latin yaitu *legitimare*, yang artinya “Memaklumkan sah”. Dengan adanya legitimasi kekuasaan berbentuk menjadi kewenangan²³. Legitimasi adalah sebuah keyakinan diri pada seseorang maupun kelompok atau otoritas yang dibenarkan dan dihormati.²⁴ Pengertian legitimasi menyimpulkan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi dan penguasa tunduk pada hukum. Namun dalam pemahaman secara agama mengenai kekuasaan dunia metafisika, otoritas moral yang telah dijelaskan diatas tidak berlaku. Karena yang hanya terlihat adalah ada tidaknya sebuah kekuasaan dan bagaimana seorang pemimpin dapat mengambil atau menguasai dunia metafisika ini.

²¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 35

²² Ibd, hal 36

²³ M. Sastrapratedja, S.J, “*Perkembangan Sistem Legitimasi Kekuasaan Politik*,” Jurnal Driyarkara Edisi XXVI No. 2., h. 1

²⁴ Budiardjo, “*Konsep Kekuasaan : Tinjauan Pustaka*,” h. 15

Di dalam konsep kekuasaan agama tidak ada tempat untuk memahami secara “Aturan hukum”²⁵. Kekebalan otoritas dalam pandangan agama terhadap tuntutan legitimasi normatif sangat tidak berarti artinya bahwa legitimasi sama sekali tidak ada. Tetapi legitimasi yang diperlukan bukanlah moralitas, tetapi agama.

Menurut Franz Magnis, ada tiga faktor tingkat legitimasi agama. Pertama, penguasa. Penguasa harus menunjukkan kemampuannya dalam memegang kekuasaan, dia harus menjalankan kebijaksanaan dan kecerdasannya untuk memecahkan masalah yang kompleks. Penguasa harus mampu menekan para pengganggu perdamaian agar tidak muncul pada pusat-pusat kekuasaan yang ia pegang. Ia harus menunjukkan dirinya bawah ia “Mampu menggunakan kekuatan dan mengatur masa berdasarkan hukuman. Dalam hal ini seorang pemimpin penguasa harus memahami mengenai kekuasaan pemimpin harus menunjukkan kapasitas empiris pemimpin dan penguasa.”²⁶

Kedua, kemampuan “Empiris” yang tidak mencukupi. Dalam filsafat Jawa seseorang yang dianggap benar-benar dapat berkuasa adalah apabila masyarakat dan pemerintahnya berada di dalam keadaan adil, makmur, tata-tentram-kertaraharja. Begitupun sebaliknya apabila masyarakat resah dan bencana atau “Pegebluk”, maka kewenangan eksekutif tidak akan dianggap sungguh-sungguh meskipun ia mampu mengayomi kedudukannya dan memaksa kehendaknya untuk rakyat.

²⁵ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1987), hal 39.

²⁶ *Ibid*, hal 42

Legitimasi religius terpendam apabila suatu pemerintahan menunjukkan buah-buah konkret yang diharapkan rakyatnya.

Tuntutan ketiga, legitimasi religius ialah agar pengasa menunjukkan mutu maupun kecerdikan tingkah laku yang menentukan prasarat kemampuannya kepada yang berhubungan dengan alam gaib. Ia harus menunjukkan dan membuktikan bahwa diri sebagai *sepi ing pamrih*, berbudi luhur, ia harus memiliki sikap bijaksana, murah hati, dan adil. Ia harus menjalankan kekuasaan tanpa adanya paksaan maupun tindakan-tindakan yang kasar.

2.2.2 Otoritas (Wewenang)

Wewenang atau otoritas kaitanya dengan kekuasaan. Menurut Robert Bierstedt di dalam esainya yang berjudul "*An Analysis of Social Power*". Yang mengemukakan bahwa otoritas merupakan kekuasaan yang dilembagakan (*Institutionalized Power*). Menurut Horld D. Laswell dan Abraham Kaplan, berpendapat bahwa kewenangan adalah "Kekuasaan formal" mereka yang berwenang dianggap dapat memiliki hak untuk mengeluarkan tata cara dan peraturan serta berhak untuk menuntut peraturan yang dipatuhinya.²⁷

Weber membagi kewenangan menjadi tiga, yaitu: tradisional, karismatik, dan rasional legal. Menurut Weber, kekuasaan ialah kemampuan dalam berhubungan sosial. Untuk melakukan kehendak tersebut seseorang dalam perlawanan dan atas dasar apapun dari kapasitas itu.²⁸ Kewenangan tradisional pada awalnya didasarkan

²⁷ Budiardjo, "*Konsep Kekuasaan : Tinjauan Pustaka*," h.. 14

²⁸ *Ibd*, hal 15

atas kepercayaan diantara sesama anggota masyarakat. Tradisi kuno dan posisi kekuasaan ini berdasarkan pada tradisi yang dianggap wajar dan dihormati. Otoritas karismatik didasarkan pada kepercayaan anggota masyarakat yang memiliki kekuatan mistik atau religious seorang pemimpin. Sedangkan kewenangan hukum rasional didasarkan pada keyakinan terhadap tatanan hukum rasional yang atas dasar keyakinan terhadap tatanan hukum rasional yang menopang kedudukan seorang pemimpin, yang perlu ditekankan bukanlah orangnya melainkan aturan-aturan yang mendasari perilakunya.²⁹

Perbedaan antara kekuasaan dengan otoritas terlihat pada kekuasaannya. Kekuasaan pada dasarnya ditempatkan di dalam kepribadian individu, otoritas dikaitkan dengan posisi peranan sosial, dan kekuasaan hanyalah sebuah hubungan faktual. Sedangkan otoritas adalah hubungan logis.³⁰

Wewenang diartikan sebagai tindakan seseorang yang memiliki kekuasaan yang sah. Dalam penjelasan ini dijelaskan bahwa wewenang dibagi menjadi dua, wewenang normatif dan wewenang etis. Wewenang yang seluruh kebijakannya didasarkan pada undang-undang dan juga wewenang keagamaan yang seluruh kebijaksanaannya sah dan kebijaksana para penguasa selama penguasa memiliki kekuasaan.

Kewenangan normatif didasarkan pada tuntutan pertanggungjawaban penguasa kepada rakyat yang harus diterapkan penguasa harus sesuai dengan

²⁹Ibd, hal 15

³⁰ Roderick Martin, *Sosiologi Kekuasaan*. Penerjemah Herry Joediono (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), h. 72

hukum yang berlaku. Sedangkan otoritas keagamaan tidak memerlukan hukum formal sebagai kerangka peraturan negara.

2.3 Kekuasaan Tradisional

Penjelasan mengenai kekuasaan tradisional yang diturunkan dari studi aristokrasi Eropa sebelum Revolusi Perancis. Di mana saat itu kekuasaan sangat penting perannya dalam hubungan antara penguasa dan massa di dalam hierarki sosial. Istilah masyarakat aristocrat yang digunakan oleh De Tocqueville untuk menjelaskan hubungan sosial ditatanan pemerintahan lama.³¹

Dalam tradisi yang paling sederhana, sistem kekuasaan aristocrat dapat kita temukan di dalam tatanan sosial seperti halnya pada keluarga. Pada dasarnya bentuk ideal masyarakat bangsawan tercermin pada hierarki kepangkatan yang sangat ketat, baik menurut usia maupun jenis kelamin. Hierarki sosial dipegang oleh kesediaan untuk menerima keberadaan tatanan sosial seperti keseragaman aturan nilai dan sudut pandang serta pola pikir yang menekankan dan melegitimasi hierarki.³² Sistem aristocrat yang paling banyak adalah sistem kekerabatan yang mengunggulkan garis patriarki, keturunan elit ini selalu mengisi masyarakat dalam perubahan yang sangat konstan. Contohnya pada masyarakat aristocrat di Eropa yaitu di Prancis sebelum revolusi.

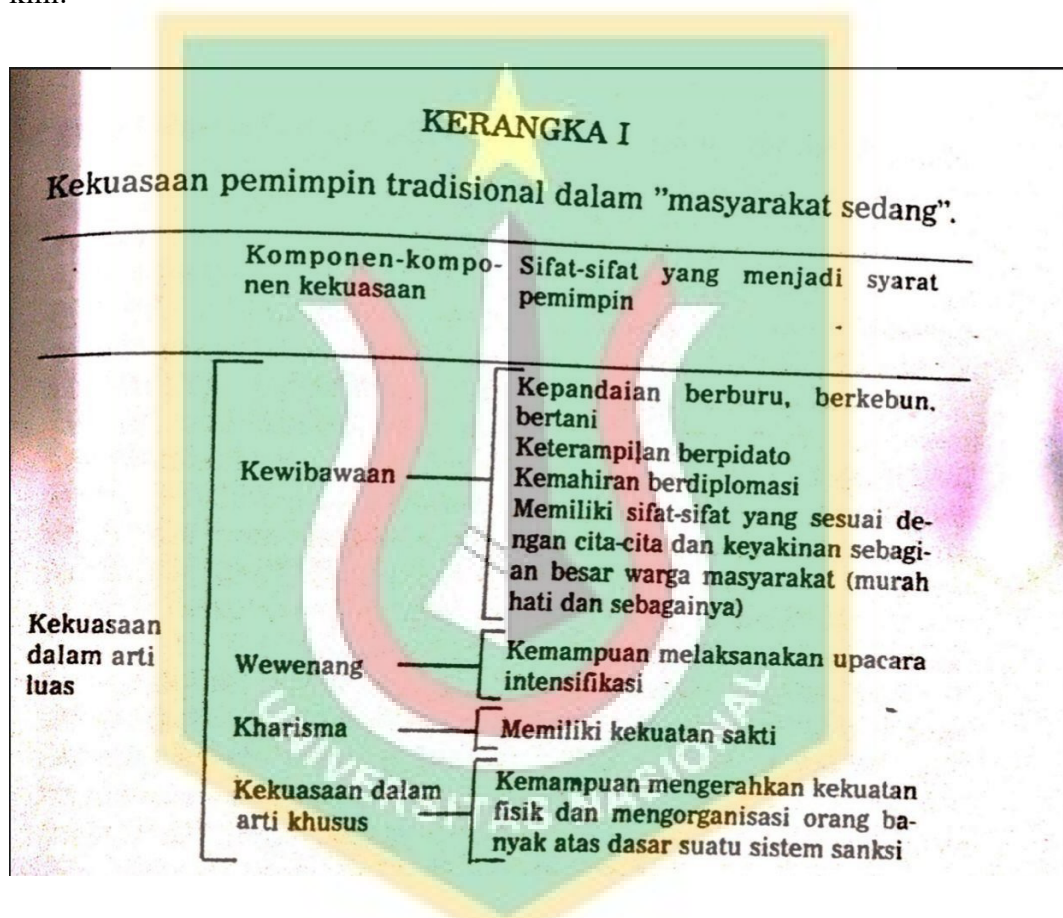
Di dalam beberapa kasus di Negara kuno diberbagai Negara seperti Afrika dan Asia termasuk Indonesia. Kekuasaan yang sering digunakan masyarakat adalah

³¹ Carter, *Otoritas dan Demokrasi*, h. 7

³² *Ibd*, hal 8

kekuasaan sistem religi. Konsep-konsep agama dan bentuk-bentuk agama untuk ini memaksakan masuk pada orientasi terpadu pada warga Negara di seluruh negeri³³.

Koenjaraningrat menggambarkan 3 kerangka kerja dari sistem kekuasaan pemimpin tradisional dalam masyarakat sedang, negara kuno, dan negara masa kini.³⁴



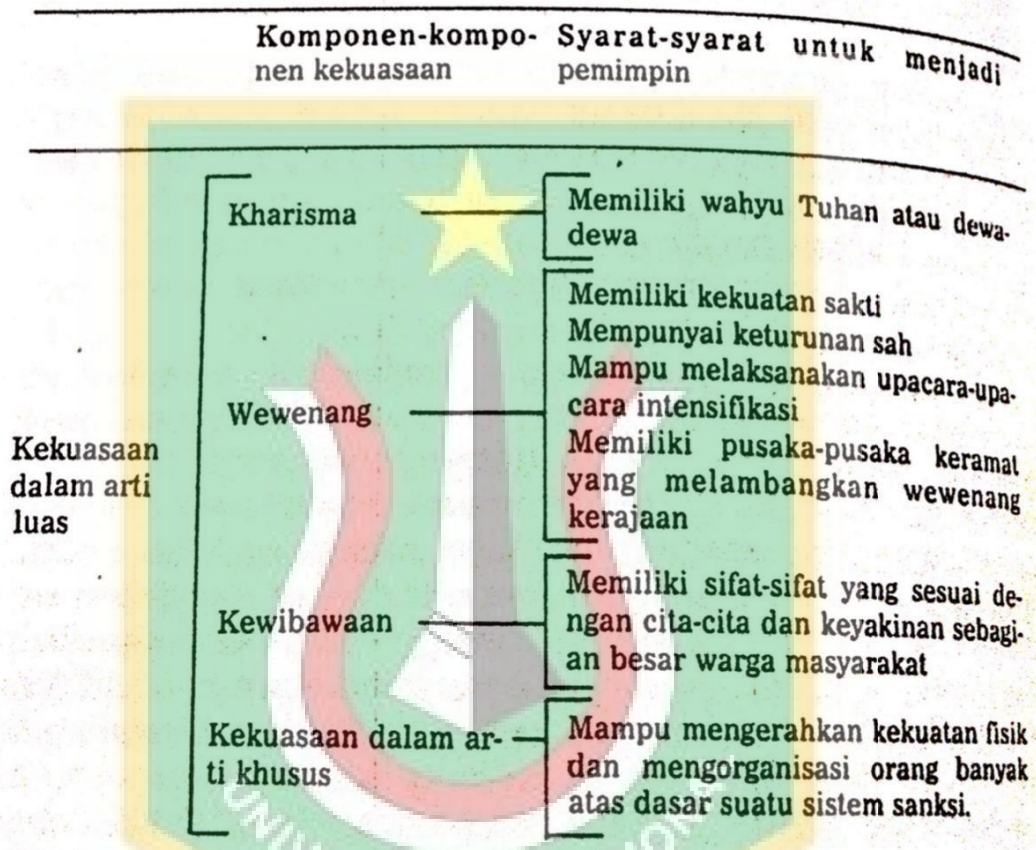
Gambar 1. Kekuasaan pemimpin tradisional dalam "masyarakat sedang"

³³ Koenjaraningrat, "Kepemimpinan dan Kekuasaan: Tradisional, Masa Kini, Resmi dan Tak Resmi", dalam Miriam Budiardjo dkk, *Aneka Kuasa dan Wibawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), h. 136

³⁴ *Ibid*, hal 138.

KERANGKA II

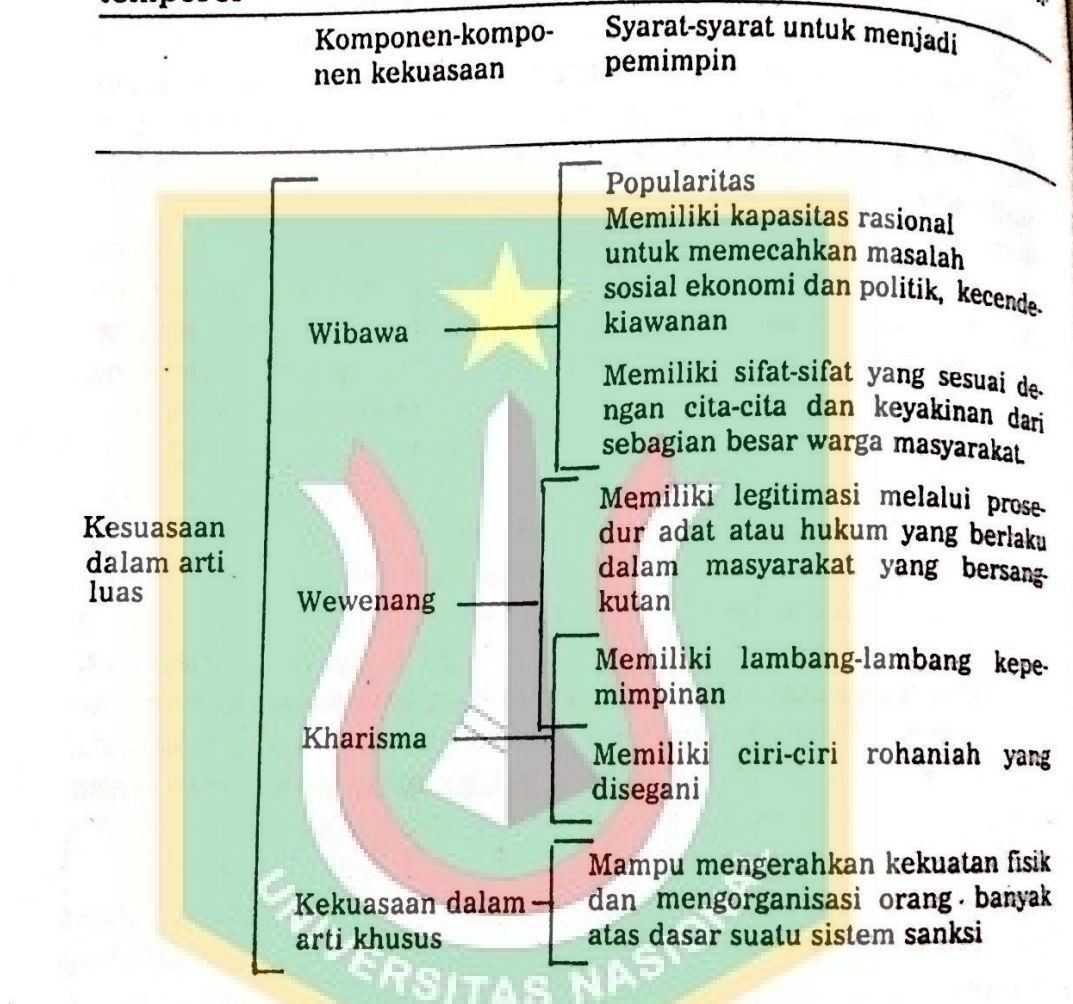
Kekuasaan pemimpin tradisional dalam masyarakat negara kuno



Gambar 2. Kekuasaan pemimpin tradisional dalam masyarakat Negara kuno

KERANGKA III

Kekuasaan Pimpinan Masa Kini Dalam Masyarakat Negara Kontemporer



Gambar 3. Kekuasaan pemimpin masa kini dalam masyarakat Negara kuno kontemporer

Struktur kekuasaan, masyarakat feodal tidak jauh dari hierarki piramida dengan kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh tangan penguasa, seorang raja yang memiliki hegemoni di wilayah yang mana raja-raja kecil diakui sebagai vassal dia juga memiliki bawahannya masing-masing, bawahannya perlu membayar sejumlah

upeti kepada atasan yang berhak yaitu kepada raja. Dan sebaliknya raja dan penguasa memberikan perlindungan kepada bawahannya.³⁵

2.4 Kekuasaan dalam Tradisi Jawa

Untuk memahami mengenai kekuasaan Jawa, terdapat dua konsep yaitu: alam lahir dan alam batin.³⁶ Dalam tradisi Jawa, kekuasaan politik yang diartikan sebagai kekuasaan yang dibuat untuk mengatur rakyat harus bersinergi dengan alam di dunia dan alam yang berakar pada kekuatan alam semesta dan metafiska.³⁷ Hal ini merupakan tradisi politik barat, mengenai masalah kekuasaan dalam tradisi Jawa sangat erat kaitannya dengan dunia gaib. Sebagian besar sastra Jawa tradisional lebih mementingkan masalah bagaimana memusatkan serta mempertahankan energi daripada masalah bagaimana menggunakannya dengan benar.³⁸



³⁵ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900; dari Emporium Sampai Imperium* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 28

³⁶ Magnis, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan Modern.*, h. 32

³⁷ *Ibid.*, hal 34.

³⁸ Anderson, "Gagasan tentang Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa," dalam Miriam Budiardjo *dkk, Aneka Kuasa dan Wibawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), h. 52

Anderson mencoba mengidentifikasi sumber kekuasaan Jawa seperti bagan di bawah ini:

Kekuasaan Jawa	Kekuasaan Barat
Kekuasaan itu kongret	Kekuasaan itu abstrak
Kekuasaan homogeny	Sumber-sumber kekuasaan bersifat heterogeny
Jumlah kekuasaan dalam alam semesta itu selalu tetap	Akumulasi kekuasaan tidak ada batasnya yang inheren
Kekuasaan tidak mempersoalkan keabsahan	Dari segi moral, kekuasaan itu ganda

Tabel 1. Perbandingan Kekuasaan Menurut Jawa dan Barat

Kekuasaan di dalam tradisi Jawa, sebagaimana yang telah digambarkan pada table di atas, dibagi menjadi empat bagian seperti yang telah dijelaskan oleh Anderson.³⁹ *Pertama*, kekuasaan itu konkret. Kekuasaan itu ada, kekuasaan bukanlah sebuah asumsi teoritis, melainkan kenyataan yang benar-benar ada. Kekuasaan adalah yang tidak dapat diganggu gugat, penuh dengan misteri dan keilahian yang menjiwai seluruh alam semesta. Serta kekuatan mendefinisikan dirinya dalam semua aspek alam, batu, kayu, awan, dan api. Tetapi hanya diungkapkan dalam misteri akhir kehidupan, yaitu proses dalam penciptaan. Dalam pemikiran tradisional Jawa tidak ada batasan yang jelas antara materi organik dan materi anorganik karena semuanya dibawa oleh kekuatan tak kasat mata yang sama

³⁹ Anderson, "Gagasan tentang Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa," h. 48-5

antara “Animism” di desa-desa Jawa dan pesisirisme metafisik yang kuat di pusat-pusat kota. Anderson menjelaskan bahwa rumusan mistik terkenal yang mengatakan “Tuhan adalah aku, mengungkapkan konkretisasi konsep kekuasaan Jawa, Kekuatan Tuhan adalah esensi saya, esensi Anda”.⁴⁰

Kedua, kekuasaan itu homogen, dari konsep ini muncul pendapat bahwa semua kekuasaan itu sama jenis dan sumbernya atau kelompok-kelompok. Ketiga, alam semesta ialah konstan. Menurut pandangan orang Jawa, alam semesta tidak mengembang dan tidak juga menyempit. Jumlah kekuasaan yang dikandungnya selalu konstan. Karena kekuasaan ini seperti bukan hasil dari organisasi, kekayaan, senjata dll. Di dalam teori politik pandangan ini memiliki konsekuensi penting yang diperlukan, yaitu bahwa pemusatan kekuasaan di satu tempat atau pada satu orang ialah proporsional.⁴¹

Keempat, kekuasaan tidak mempersoalkan legitimasinya karena kekuasaan berasal dari sumber yang homogen. Dalam pikiran orang Jawa tidak mengenal kekuasaan yang absah maupun tidak absah. Jika kekuasaan dikaitkan dengan sumber yang menopang kekuasaan tersebut, contohnya pada kekuasaan berdasarkan harta sedangkan kekuasaan berdasarkan senjata tidak sah. Pemikiran tersebut tidak sah dengan pemikiran orang Jawa melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang ada. Sementara, kekuasaan didefinisikan dalam tradisi barat sebagai empat identifikasi, yaitu:

⁴⁰ *Miriam*

Budiardjo dkk, Aneka Kuasa dan Wibawa (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hal 51

⁴¹ *Ibd* hal 52

Pertama, kekuasaan bersifat abstrak, artinya bahwa bila diungkapkan dengan kata-kata arti kekuasaan tidak “ada”. Kekuasaan adalah kata yang sering digunakan untuk menggambarkan satu atau lebih sebuah hubungan sosial. Seperti halnya otoritas dan legitimasi kekuasaan adalah abstraksi formula untuk pola interaksi sosial tertentu yang diamati.⁴²

Kedua, sumber kekuasaan yang heterogen. Kekuasaan diyakini berasal dari pola pikir hubungan sosial tertentu, banyak pemikir politik Barat telah mengabdikan dirinya untuk mengklasifikasikan serta menganalisis pola hubungan ini untuk menganalisis pola hubungan yang memperhatikan bagaimana berbagai sumber kekuasaan dapat dibedakan.

Ketiga, akumulasi kekuasaan tidak memiliki batas yang melekat. Karena kekuasaan hanyalah sebuah abstraksi yang menggambarkan hubungan tertentu antara orang-orang, kekuasaan tidak secara inheren membatasi diri.

Keempat, dari segi moral kekuasaan memiliki arti ganda. Merupakan konsekuensi logis dari pandangan sekuler mengenai kekuasaan politik sebagai hubungan antar orang-orang yang kekuasaannya itu sendiri tidak sah. Makna moral ini diperkuat dengan adanya anggapan bahwa kekuasaan berasal dari sumber yang heterogen.⁴³

Anderson menyatakan bahwa perbedaan kontras antara konsep orang Eropa dan orang Jawa umumnya menganggap kekuasaan sebagai suatu kekuatan energi

⁴² Ibd hal 50

⁴³ Ibd hal 50

yang sakti dan keramat, yang secara konkret ada dalam lingkungan alam manusia tetapi di luar diri orang yang mempergunakannya titik oleh karena itu penggunaan kekuasaan itu bersifat otomatis dan tidak mempunyai implikasi moral dan tidak mempunyai persyaratan kualitas bagi orang yang mempergunakannya berdasarkan konsepsi itu seorang raja atau pemimpin Jawa akan beranggapan bahwa asalkan ia menguasai sumber dari kekuasaan itu saja misal benda pusaka yang sakti maka ia memiliki suatu hal yang identik dengan kekuasaan itu sendiri.

Sedangkan dalam pandangan Eropa kekuasaan hanyalah merupakan suatu kualitas abstrak yang sekuler saja dari suatu hubungan antar manusia. Dengan demikian kekuasaan erat sangkut pautnya dengan, dan tidak berada di luar diri orang yang mempergunakannya dan karena itu mempunyai implikasi moral bagi orang tersebut ia harus memenuhi berbagai macam persyaratan kualitas lain untuk hubungan itu.⁴⁴

Sartono mengemukakan bahwa perbedaan pokok antara pandangan Jawa tradisional tentang sejarah dan prespektif barat modern adalah bahwa menurut pandangan modern, sejarah dipandang sebagai suatu gerakan yang menuruti garis lurus yang berjalan mengikuti waktu, sedangkan dalam pandangan Jawa secara tradisional cenderung menganggap sejarah mereka sebagai serangkaian lingkaran yang terjadi berulang-ulang. Pandangan sejarah orang Jawa adalah pandangan gerak bolak-balik kosmologis antara masa-masa pemusatan kekuasaan dan masa-masa terpancarnya kekuasaan. Pentingnya masa terpancar ini, dari segi keharusan

⁴⁴ Ibid hal 128

sejarah tidak kurang daripada pentingnya masa pemusatan karena kekuasaan amat sukar untuk dipertahankan dan harus terus-menerus diperjuangkan. Kalau kendor sedikit saja ataupun lengah maka ini dapat menyebabkan mulainya proses disintegrasi, yang sekali telah mulai tidak dapat dibalikkan lagi.⁴⁵

Kata jumbuhin kawulo Gusti (menyatu hamba dan tuan) melukiskan tujuan tertinggi dalam kehidupan manusia, yaitu tercapainya kesatuan yang sesungguhnya atau manunggal dengan Tuhan. Pelukisan ini lebih dramatis lagi karena kata kaulah dan Gusti menunjukkan status manusia yang paling rendah dan paling tinggi dalam masyarakat. Persatuan hamba dan tuan hanyalah mungkin karena adanya ikatan-ikatan tertentu antara dan sifat-sifat yang sama pada, manusia dan Tuhan sifat-sifat ini terletak dalam hakikat atau dasar yang paling dalam dari Tuhan dan manusia yang dinyatakan oleh orang Jawa dengan kata Sukma, yang berasal dari India, atau dengan kata Nur atau cahaya, yang asalnya dari bahasa Arab. Karena semua orang memiliki sifat-sifat ini, dapatlah orang memahami bagaimana pentingnya hubungan yang akrab dan pribadi dalam menentukan komunikasi sosial dalam masyarakat Jawa bahkan menjembatani jurang-jurang yang lebar.⁴⁶

Konsep kawulo Gusti sangat diwarnai oleh ciri lain pemikiran Jawa kepercayaan yang tak tergoyahkan akan nasib, akan hal-hal yang sudah ditakdirkan, yang dinyatakan dalam kata pineste atau ditentukan tinitas atau ditakdirkan, atau kata pinjaman dari bahasa Arab, takdir. Walaupun dapat ikatan yang

⁴⁵ Ibd hal 129

⁴⁶ Moertono soemarsaid. *Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad xvi-xix (Jakarta: KGP, 2017) hal 21*

mempersatukan, namun baik hamba maupun tuan tidak diperkenankan melanggar garis pemisah yang resmi dari hierarki sosial ini, yang berdasarkan kelahiran atau pangkat dan jelas terlihat dalam banyak peraturan yang menentukan tataran pemakaian busana atau bahasa penggunaan warna atau cara penghormatan. Dengan kata lain, perhatian yang mendalam terhadap kebutuhan dan penderitaan satu sama lain, atau perasaan simpati yang mendalam terhadap satu sama lain tidak dapat dijadikan alasan untuk melupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat, suatu kedudukan atau tempat yang telah ditentukan oleh nasib.⁴⁷

Dalam pemikiran tradisional Jawa adalah terdapat anggapan tentang hubungan antara alam Makrokosmos dan Mikrokosmos. Makrokosmos, atau Bhuwana Agung merupakan keseluruhan jagat raya yang dikuasai oleh dewa-dewa yang memiliki pusat kedudukan di Meru. Sementara Mikrokosmos, atau Bhuwana Alit merupakan kerajaan sebagai wujud yang lebih kecil dari Makrokosmos, dan dikuasai oleh raja. Kekuasaan raja yang berkuasa di suatu kerajaan ditentukan oleh hubungan sinergi antara Makrokosmos dan Mikrokosmos yang akhirnya memberikan legalitas legitimasi kepada raja tersebut.⁴⁸

Karena itu, dalam kebudayaan tradisional Jawa, seperti juga yang ditemukan dalam berbagai kebudayaan di Asia Tenggara pada umumnya, menyamakan kedudukan seorang raja dengan dewa-dewa. Raja dianggap

⁴⁷ Ibid hal 23

⁴⁸ INDONESIA, Mata Kuliah Pemikiran Politik, et al. Praktik Kepemimpinan Soeharto dalam Perspektif Pemikiran Politik Tradisionalisme Jawa. 2014.

merupakan perwujudan dewa-dewa yang turun ke dunia. Konsep dewa raja ini berakar pada kebudayaan Hindu yang berkembang di Asia Tenggara.⁴⁹

Dalam konsep orang Jawa tentang organisme negara, raja atau ratullah yang menjadi eksponen mikrokosmos negara. Bahwa pandangan tentang alam yang terbagi dalam mikrokosmos dunia manusia dan makrokosmos dunia supra-manusia adalah suatu yang pokok bagi pandangan dunia orang Jawa itu merupakan suatu kenyataan yang telah begitu terkenal sehingga tidak lagi membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam pandangan ini terkandung dua faktor yang penting bagi pemahaman orang Jawa mengenai kehidupan negara: pertama, adanya kesejajaran antara makhluk cosmos dan mikrokosmos, dan kedua adanya pengaruh timbal balik antara makrokosmos dan mikrokosmos kedua faktor ini menentukan bahwa ketertiban sosial (Tata masyarakat) seyogianya dianggap sebagai peraturan yang teliti dan ketat yang mengikuti perubahan-perubahan musim yang sinambung tiada hentinya dan pasti di dalam alam dan tiba serta berlalunya konstelasi bintang.⁵⁰

Selain memusatkan perhatian pada masalah silsilah atau keturunan, hal itu menjadi sangat penting bagi penguasa Jawa. Hubungan antara seksualitas dan kekuasaan dalam pemikiran Jawa dan gagasan bahwa sperma manusia, terutama sperma seseorang yang berkuasa, adalah pemusatan kekuasaan yang berbeda dan sarana untuk menyebarkannya.

⁴⁹ Ibid hal hal 3

⁵⁰ Moertono soemarsaid. *Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad xvi-xix (Jakarta: KGP, 2017) hal 39*

Selain sentralisasi dan persoalan pewarisan untuk menjaga kelangsungan kepemimpinan kerajaan berdasarkan pewarisan, perlu dikuatkan kembali dengan keyakinan bahwa leluhur dapat didekatkan kepada dewa-dewa agar kekuasaan berbasis pewarisan menjadi tidak hanya otoritas yang kuat, tetapi juga yang suci atau keramat.⁵¹

Cara untuk mendapatkan atau mencari kekuasaan dalam tradisi ortodoks:⁵²

1. Cara untuk memperoleh adalah dengan praktik-praktik meditasi atau bertapa yang sangat keras. Cara ini juga termasuk berpuasa tidak tidur, tidak berhubungan seksual atau menggunakan ritual-ritual lainnya.
2. Dalam tradisi Jawa sendiri penguasa harus mengumpulkan disekelilingnya baik itu benda atau pun orang yang dipercayai mampu memberikan kekuasaan, seperti pusaka ataupun ilmu-ilmu ghaib.

2.5 Kerangka Pemikiran

Di dalam penulisan penelitian ini saya ingin mencari apa saja strategi politik Sultan Agung guna menguatkan posisinya sebagai seorang raja dan menjelaskan lebih sistematis dalam analisis ilmu politik dengan menggunakan teori kekuasaan, terutama kekuasaan Jawa dan juga bagaimana strategi politik Sultan Agung dalam memperluas kekuasaan terkait otoritas kerajaan di Mataram Islam.

⁵¹ Koentjaraningrat, “*Kepemimpinan dan Kekuasaan: Tradisional, Masa Kini, Resmi dan Tak Resmi*,” h. 136

⁵² Budiardjo, “*Konsep Kekuasaan: Tinjauan Pustaka*,” h.52

